BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia teknologi informasi kini semakin berkembang. Kehadirannya ditengah kehidupan manusia telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah pada bidang pekerjaan / bisnis.

Dunia bisnis sekarang ini tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan informasi. Kebutuhan akan informasi tersebut membuat para pelaku usaha / bisnis berusaha untuk menghadirkan teknologi informasi terbaru yang mendukung di perusahaannya, karena dengan kehadiran teknologi informasi, informasi penting yang diperlukan akan didapat lebih cepat, lebih mudah dan hasilnya pun akan lebih efisien jika dibandingkan dengan informasi yang didapat dengan cara manual.

Untuk mencapai tujuannya, tiap organisasi memerlukan manajemen yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dengan berkembang pesatnya teknologi, alat pengolah data komputer dan teknologi peralatan komunikasi, maka pekerjaan manajemen dan pelayanan masyarakat yang memerlukan dukungan data dan informasi mengalami kemajuan yang pesat pula.

Pengolahan data dan informasi merupakan suatu hal mutlak yang sangat diperlukan bagi sebuah organisasi, terlebih di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, dimana penyajian informasi dituntut tidak hanya harus akurat tapi juga bisa diperoleh dengan mudah dan cepat.

Untuk menyajikan informasi yang cepat dan akurat ini, maka dalam proses pengolahan data harus dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem yang biasa disebut sistem informasi. Dengan dilakukannya proses pengolahan data secara terkomputerisasi, maka pekerjaan-pekerjaan pengolahan data tersebut bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat khususnya divisi Pengendalian Subbidang Data dan Pelaporan, sistem informasi yang ada masih bersifat manual. Kurangnya pengetahuan dari karyawan tentang penggunaan teknologi komputer sehingga fasilitas yang disediakan belum semuanya terkomputerisasi. Kebanyakan masih menggunakan mesin tik.

Tugas pokok dari Subbidang Data dan Pelaporan yaitu melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan penanaman modal. Proses pengolah data yang dilakukan telah menggunakan komputer, namun penginputan yang dilakukan masih bersifat manual dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Excel. Terkadang satu karyawan melakukan dua tugas sekaligus, yaitu menulis data yang masuk secara manual dan kemudian menginputnya ke komputer.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu sistem informasi yang telah terkomputerisasi Di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat khususnya divisi Pengendalian Subbidang Data dan Pelaporan dan menjadikannya sebagai objek penelitian pada kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan oleh penulis. Adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

"SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPPMD) PROVINSI JAWA BARAT".

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Belum efektifnya sistem informasi dalam pengolahan data dan informasi penanaman modal pada Subbidang Data dan Pelaporan.
2. Sistem informasi pengolahan data dan informasi penanaman modal di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) masih dilakukan secara manual sehingga menghambat dalam proses pengolahan data.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem informasi pengolahan data dan informasi penanaman modal yang sedang berjalan pada Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana sistem sistem informasi pengolahan data dan informasi penanaman modal yang diusulkan pada Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan

Adapun tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah :

1. Untuk mengetahui sistem informasi pengolah data dan informasi penanaman modal yang sedang berjalan pada Subbidang Data dan Pelaporan.
2. Untuk membuat usulan sistem informasi pengolahan data dan informasi penanaman modal yang terkomputerisasi pada Subbidang Data dan Pelaporan.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah hanya pada bidang Pengendalian Subbidang Data dan Pelaporan. Dari rumusan masalah di atas, penulis membatasi permasalahan pada :

1. Pengolahan data perusahaan yang telah melakukan kegiatan penanaman modal.
2. Pengklasifikasian perusahaan berdasarkan ada tidaknya IUT (Izin Usaha Tetap)
3. Penelitian tidak membahas tentang pembuatan IUT.

1.5. Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek

Lokasi atau Tempat dan kedudukan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat di Jl. Sumatera No. 50, Bandung.

Table 1.1

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	WAKTU															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Kerja Praktek																
2	Penerimaan Kerja Praktek																
3	Pelaksanaan Kerja Praktek																
4	Penyusunan Laporan																

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sistem, diantaranya :

Menurut Zulkifli (2001) *Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi*.

Menurut Jogiyanto (2005 : 1) *Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.*

Dari pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari "Sistem adalah suatu kumpulan komponen fisik maupun non-fisik yang membentuk suatu jaringan kerja untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai sasaran tertentu".

2.1.1. Elemen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, diantaranya adalah:

1. Tujuan

   Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tentu saja, tujuan antara sistem satu dengan sistem yang lain berbeda.

2. Masukan

   Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

3. Proses

   Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang tidak berguna.

4. Keluaran

   Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi keluaran bisa berupa suatu informasi, sasaran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5. Batas

   Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem.

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

   Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

7. Lingkungan

   Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

2.1.2. Karakteristik Sistem

Adapun penjelasan dari karakteristik suatu sistem adalah sebagai berikut :

1. Komponen Sistem

   Bagian sistem yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan. Komponen atau elemen sistem dapat berupa subsistem atau beberapa bagian sistem.

2. Batasan Sistem

   Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan lingkungannya atau dengan sistem yang lainnya. Batas sistem inilah yang membuat system dipandang sebagai satu kesatuan.

3. Lingkungan Luar Sistem

   Segala sesuatu yang berada di luar system yang mempengaruhi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan sistem atau merugikan sistem.

4. Penghubung Sistem

   Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dengan penghubung inilah yang menyebabkan beberapa subsistem berintegrasi dan membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem

   Sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang berasal dari lingkungan.

6. Keluaran Sistem

   Suatu hasil dari proses pengolahan system yang dikeluarkan ke lingkungan.

7. Pengolah Sistem

   Bagian dari sistem yang mengubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran dan Tujuan Sistem

   Sasaran sistem adalah sesuatu yang menyebabkan mengapa sistem itu dibuat atau ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

2.1.3. Klasifikasi Sistem

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

   Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan.

   Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer , sistem sekolah, sistem penjualan, sistem akuntansi dan sistem transportasi.

2. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik

   Sistem deterministik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksikan secara tepat, misalnya sistem komputer.

   Sistem probabilistik adalah sistem yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem sediaan, kebutuhan rata-rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan tetapi nilai yang tepat sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti.

3. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

   Sistem tetutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi.

   Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem perusahaan dagang.

4. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

   Sistem alamiah adalah system yang tejadi karena alam, misalnya sistem tata surya.

   Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia, misalnya sistem komputer.

5. Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks

   Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem sederhana (misalnya sepeda) dan sistem kompleks (misalnya otak manusia).

2.2. Pengertian Informasi

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian informasi, diantaranya :

Menurut Jogiyanto (1999) *Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang*

menggambarkan suatu kejadian-kejadian (events) yang nyata (fact) yang berguna untuk para pengambil keputusan.

Menurut Jogiyanto (2005 : 8) *Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.*

Menurut Zulkifli (2001) *Informasi adalah data yang telah diolah dengan cara tertentu sesuai dengan bentuk yang diperlukan*.

Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari "Informasi adalah data-data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerima informasi dalam pengambilan keputusan."

2.3. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto (2005 : 11) Sistem Informasi didefenisikan oleh Robert A. Leith dan K. Roscoe Davis adalah *"Sistem Informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan"*.

2.4. Metode Analisis dan Perancangan Terstruktur

2.4.1. Flow Map

Flow map merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir yang termasuk tembusan-tembusannya, juga merupakan penguraian dari

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi serta dapat mengevaluasi suatu permasalahan yang diharapkan dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

2.4.2. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah arus data yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar. Bagian luar ini merupakan sumber arus data atau tujuan yang berhubungan dengan sistem informasi tersebut.

2.4.3. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Aliran Data adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi khusus untuk menggambarkan arus data atau aliran data yang terjadi di dalam sistem. *Data Flow Diagram* (DFD) memproses sistem dalam komponen-komponen beserta seluruh penghubung antar komponen. *Data Flow Diagram* (DFD) ini merupakan penurunan atau penjabaran dari diagram konteks.

2.4.4. Kamus Data

Kamus data adalah katalog fakta tentang datangnya data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan mengunakan kamus data, pemakai dan analis sistem bisa mempunyai pengertian yang sama tentang input dan output. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada pada *data flow diagram* (DFD).

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 1 tahun 1967 jo Undang-Undang No 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perangkat peraturan pelaksanaannya telah memberikan peluang yang besar kepada usaha dunia swasta untuk melaksanakan kegiatan investasi.

Peranan investasi swasta bagi pembangunan baik regional maupun nasional merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting terhadap terciptanya kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dalam hal ini penanaman modal sangat multisektoral dan tidak mengenal batas-batas wilayah baik provinsi maupun kabupaten / kota, oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan kebijakan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi yang dapat mempartaruhkan berbagai kepentingan wilayah maupun kepentingan sektoral.

Pelayanan investasi baik PMDM maupun PMA di daerah merupakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPMD (sekarang namanya telah berubah menjadi BKPPMD) sebagaimana telah diatur terakhir dengan Keppres No 122 tahun 1999, yaitu sebagai badan staf Gubernur provinsi dalam rangka memberikan pelayanan perijinan, persetujuan PMA dan PMDN serta perijinan

pelaksanaan penanaman modal lainnya dalam jumlah investasi yang tidak terbatas bagi investor dalam negeri. Adanya kebijakan baru dibidang investasi oleh pemerintah sejak tahun 1998 merupakan langkah reformasi guna menggerakkan roda perekonomian yang mengalami krisis dan mempunyai dampak turunnya kepercayaan masyarakat khususnya dunia usaha swasta asing (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat kegiatan investasi merupakan motor pertumbuhan ekonomi, maka perlu upaya mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan promosi, pelayanan perijinan dan pengendaliannya dengan harapan agar kegiatan investasi tidak saja mampu memulihkan perekonomian yang terpuruk tetapi juga dapat menjadikan perekonomian yang tangguh, handal dan mandiri.

Selanjutnya berkaitan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah secara umum dapat membawa konsekwensi perubahan yang sangat mendasar dalam hak kewenangan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten / kota dan membawa konsekwensi yang menyangkut struktur kesisteman. Namun konsekwensi kewenangan tersebut tidak terjelaskan dengan gambling serta mengandung perkiraan atau penapsiran yang beragam diantara pemerintah, pusat, provinsi maupun kabupaten / kota, mengingat bahwa penanaman modal merupakan keputusan politik dan langkah pembangunan yang strategis dan krusial serta dikaitkan dengan kewenangan daerah provinsi sesuai pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No 22 tahun 1999, maka lembaga yang menangani penanaman modal di provinsi diperlukan penyempurnaan dengan

pembagian kewenangan penanganan penanaman modal antara daerah, provinsi dan kabupaten / kota.

Sebagaimana dimaklumi, partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha terutama melalui kegiatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing masih menjadi titik terang ditengah-tengah kesulitan ekonomi dewasa ini. Turunnya nilai rupiah mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap proyek-proyek investasi yang dirugikan maupun diuntungkan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut BKPMD yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menangani investasi, dituntut berperan memperbaiki keadaan untuk meningkatkan kembali kepercayaan dunia usaha swasta melalui berbagai program kegiatan pada bidang-bidang yang meliputi perencanaan investasi, peningkatan promosi, pemantauan pelayanan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta pemecahan berbagai masalah yang menghambat penyelenggaraan pelayanan investasi.

Berbagai harapan dan upaya peningkatan peran BKPMD sekaligus dalam rangka upaya reformasi dibidang penanaman modal dapat disampaikan sebagi berikut :

1. Adanya pelimpahan sebagian besar wewenang BKPM kepada BKPMD dengan system pelayanan *"One Stop Service"* melalui pola opsi (bisa ke BKPM, bisa ke BKPMD atau ke perwakilan RI di luar negeri untuk persetujuan prinsip).
2. Adanya kebijakan untuk menerapkan pola pelayanan perijinan satu atap di setiap daerah kabupaten / kota, diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan investasi yang cepat, tepat, mudah, murah dan transparan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif guna meningkatkan realisasi investasi untuk memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperluas pemerataan pembangunan, dengan demikian memberi peluang kepada BKPMD untuk dapat memantau lebih efisien realisasi investasi di kabupaten / kota.

3. Terhadap perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA yang terkena dampak krisis, perlu diadakan pendataan secara lengkap, untuk selanjutnya dibantu dengan cara diberikan jalan keluar dengan berbagai alternative seperti pengalihan asset, pengalihan saham, merger serta perubahan lainnya.
4. Dari sisi skala usaha, maka usaha kecil dan menengah semakin memperoleh perhatian untuk ditumbuh kembangkan, karena kelompok ini cukup mampu bertahan meskipun dalam keadaan krisis ekonomi. Upaya memberdayakan ekonomi rakyat ditekankan kapada pola usah kemitraan.
5. Dengan kekayaan alam Jawa Barat yang besar, maka era sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan penyusunan rencana dan strategi baru, agar potensi yang besar tersebut dapat ditawarkan kepada para investor dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang lebih menarik.

Dilain pihak dengan diterbitkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab secara eksplisit dinyatakan bahwa kewenangan penanaman modal mejadi kewenangan wajib kabupaten / kota yang berarti kewenangan penanaman modal ditingkat provinsi tidak ada.

Lalu pemikiran dan pemahaman seperti ini dijadikan landasan Biro Organisasi Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk mendesain organisasi perangkat daerah disamping berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka di daerah telah diterbitkan juga Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 13 Desember 2000 dalam lembaran daerah provinsi Jawa Barat tahun 2000.

Peraturan daerah No 16 tahun 2000 ini merupakan dasar hukum lahirnya Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPMD) sejak tanggal 13 Desember 2000 telah berubah nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPPMD).

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang ada dalam suatu perusahaan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan. Disamping itu, struktur organisasi perusahaan mengemukakan adanya batas-batas dari wewenang dan tanggung jawab setiap pimpinan atas kegiatan perusahaan sehingga dapat mengukur prestasi setiap karyawan di dalam lingkungan kerjanya masing-masing.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi BPKPMD Provinsi Jawa Barat :

3.3. Deskripsi Kerja

Deskripsi Kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi uraian atau gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan oleh si pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan alasan apa yang mengharuskan pekerjaan tersebut dilakukan. Uraian tersebut berisi tentang hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di dalam dan di luar organisasi serta ruang lingkup pekerjaan dimana si pemegang jabatan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh divisi/unit kerja atau tujuan organisasi secara keseluruhan.

Berikut adalah uraian tugas (*job description*) setiap bagian yang terdapat pada BKPPMD :

1. Badan

   Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah. Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah.
   b. Penyelenggaraan kesekretarian, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitas investasi dan pengembangan investasi.
   c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

2. Kepala Badan

   Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

tugas pokok Badan serta menkoodinasikan dan membina UPTB. Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitas investasi dan pengembangan investasi.
b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan koordinasi promosi dan penanaman modal.
c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas koordinasi promosi dan penanaman modal.
d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program secretariat
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat membawahi tiga Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Perencanaan dan Program

Subbidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

2) Subbidang Keuangan

Subbidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

3) Subbidang Kepegawaian dan Umum

Subbidang Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

4. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian penanaman modal. Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajianbahan kebijakan teknis pengendalian
b. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan pelaporan penanaman modal.

Bidang Pengendalian membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Pengendalian

Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan pengendalian penanaman modal.

2) Subbidang Data dan Pelaporan

Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan penanaman modal.

5. Bidang Promosi

Bidang Promosi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan fasilitas promosi. Bidang Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis promosi
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi
c. Penyelenggaraan dan fasilitas promosi.

Bidang Promosi membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Promosi Dalam Negeri

Subbidang Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan promosi dalam negeri.

2) Subbidang Promosi Luar Negeri

Subbidang Promosi Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan promosi luar negeri.

6. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan serta

fasilitas investasi. Bidang pelayanan dan Fasilitas Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan fasilitas investasi
b. Penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan fasilitas investasi dengan unit dan stakeholders terkait
c. Penyelenggaraan penyusunan bahan dan fasilitas pelayanan serta investasi
d. Penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas investasi.

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi membawahi dua Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pelayanan

   Subbidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelayanan investasi.

2) Subbidang Fasilitas

   Subbidang Fasilitas mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksankan fasilitas investasi.

7. Bidang Pengembangan Investasi

Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi.

Bidang Pengembangan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi

b. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi

c. Penyelenggaraan penyusunan data potensi dan peluang investasi serta pemetaan kebutuhan infrastruktur pendukung investasi.

Bidang Pengembangan Investasi membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang

   Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan potensi dan peluang investasi.

2) Subbidang Pengembangan Infrastruktur

   Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengembangan infrastruktur penunjang investasi.

3.4. Analisis Sistem yang sedang Berjalan

Sebelum melakukan perancangan sistem informasi yang baru pada suatu organisasi, maka harus dilakukan analisis sistem terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang sedang berjalan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, kegiatan pengolahan data di Bidang Pengendalian khususnya Subbidang Data dan Pelaporan dilakukan dalam dua tahap yaitu secara manual dan kemudian secara terkomputerisasi. Secara manual, data yang masuk berupa laporan (LKPM :

Laporan Kegiatan Penanaman Modal) akan dicatat dalam arsip dan kemudian dibedakan antara yang L1 dan L2. L1 maksudnya untuk data LKPM yang belum memiliki IUT (Izin Usaha Tetap), sedangkan L2 untuk data LKPM yang telah memiliki IUT. Setelah secara manual selesai kemudian akan di input kan ke komputer secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Disini terjadi pemborosan waktu, kerena karyawan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Dan penginputan yang masih manual sering menimbulkan kendala buat karyawan, dan akan terjadi kemalasan jika banyak data perusahaan yang masuk.

BAB IV

ANALISIS KERJA PRAKTEK

4.1. Analisis Sistem

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponenya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Langkah-langkah analisis sistem antara lain :

1. *Identify*, yaitu memahami masalah.
2. *Understand*, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
3. *Analyze*, yaitu menganalisis sistem.
4. *Report*, yaitu membuat laporan hasil analisis.

4.1.1 Analisis Dokumen

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menguraikan dokumen yang dipakai dalam sistem adalah nama yang digunakan, fungsi-fungsi dan penjelasan dari dokumen tersebut. Penggunaan dokumen secara lengkap dilakukan untuk mengetahui jalur distribusi, fungsi dan frekuensi kedatangan dari dokumen yang terlibat di dalam sistem pengolahan data dan informasi penanaman modal di BKPPMD Provinsi Jawa Barat. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengolahan data dan informasi adalah……

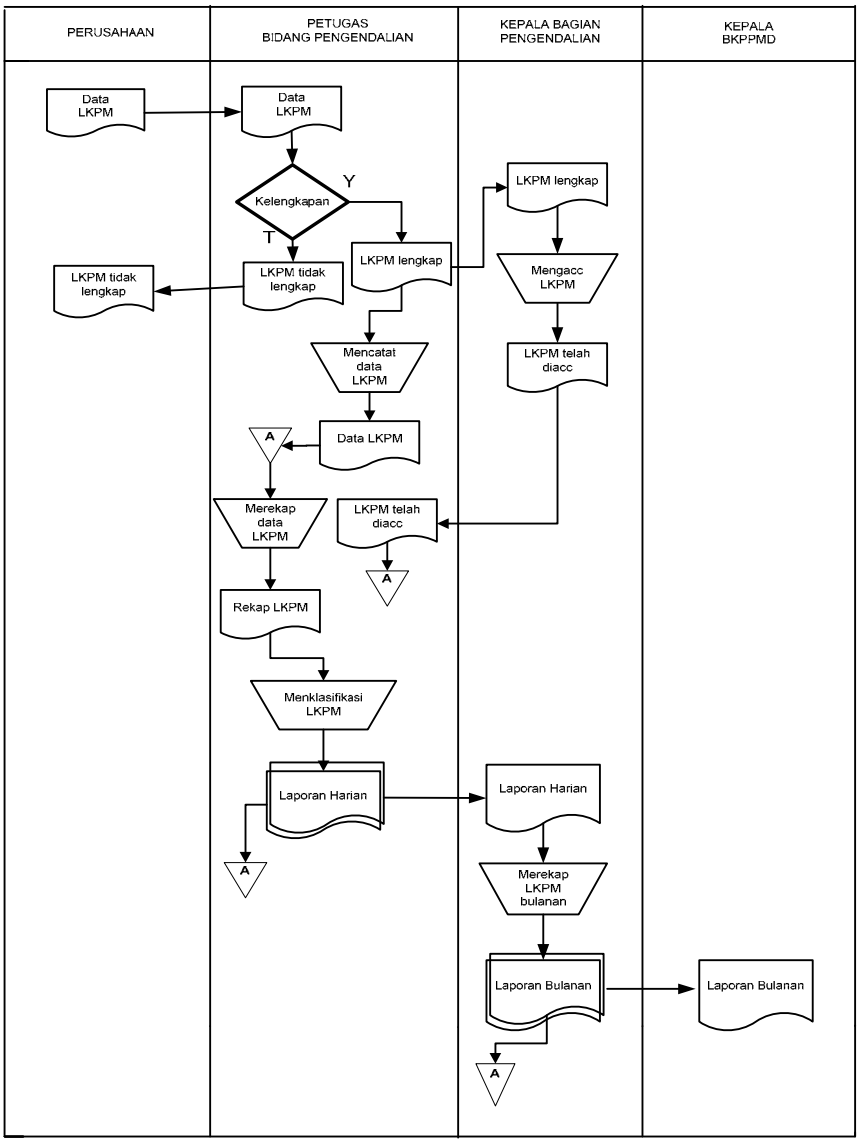
4.1.2. Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan

Prosedur pengolahan data dan informasi kegiatan penanaman modal yang berjalan di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Petugas bagian pengendalian akan menerima data LKPM dari perusahaan. LKPM yang diterima akan diseleksi, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi ke perusahaan untuk dilengkapi.
2. Data LKPM yang telah diseleksi akan dicatat oleh petugas untuk di jadikan arsip. Setelah itu akan diberikan ke Kepala Bagian Pengendalian untuk di acc. LKPM yang telah di acc akan dikembalikan lagi ke petugas bidang pengendalian untuk arsipkan.
3. Petugas akan merekapitulasi jumlah LKMP yang masuk dan mengklasifikasikan sesuai dengan kepemilikannya untuk dijadikan laporan harian.
4. Petugas bidang pengendalian kemudian menyerahkan laporan harian tersebut kepada Kepala Bidang Pengendalian untuk selanjutnya direkap menjadi laporan bulanan.
5. Lapoaran bulanan yang telah dibuat kemudian akan diserahkan kepada Kepala BKPPMD.

4.1.2.1. Flow Map

Dari prosedur di atas dapat digambarkan flow map sebagai berikut:



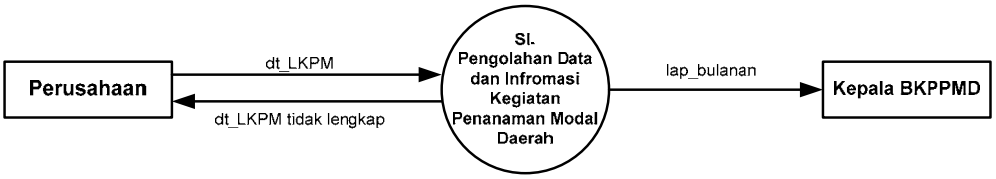
Keterangan :

A : Arsip

Gambar 4.1
Flow Map Sistem yang Berjalan

4.1.2.2. Diagram Konteks

Diagram konteks berfungsi untuk menggambarkan suatu sistem yang sedang berjalan secara keseluruhan, termasuk menggambarkan aliran-aliran data yang masuk dan keluar pada sistem tersebut.

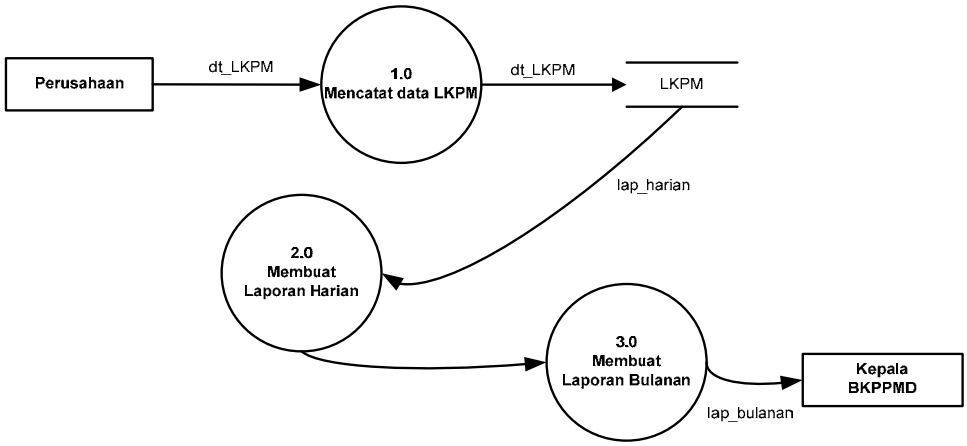


Gambar 4.2
Diagram Konteks Sistem yang Berjalan

4.1.2.3. DFD (Data Flow Diagram)

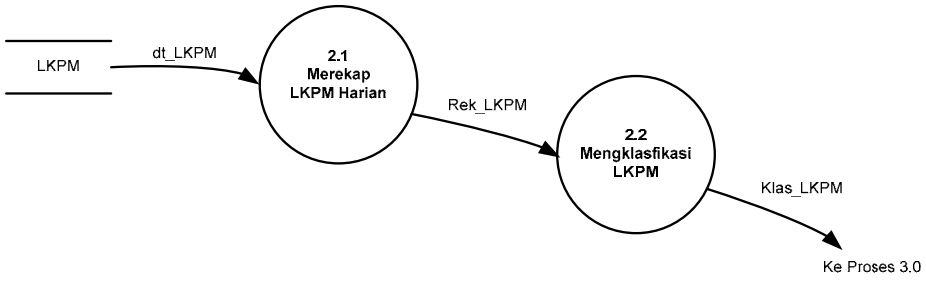
Data flow diagram (DFD) menggambarkan hubungan antar proses yang terjadi di dalam suatu sistem. Adapun *data flow diagram* yang sedang berjalan saat ini adalah :

- ***Data Flow Diagram* (DFD) Level 0 :**



Gambar 4.3
DFD Level 0 Sistem yang Berjalan

- ***Data Flow Diagram* (DFD) Level 1 Untuk proses 2.0 (Laporan harian):**



Gambar 4.4
DFD Level 1 Untuk Proses 2.0 (Laporan Harian) Sistem yang Berjalan

4.1.3. Evaluasi Sistem yang Berjalan

Dari deskripsi sistem yang berjalan tersebut di atas terlihat masih adanya proses pengolahan data yang dilakukan secara manual, sehingga sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kerja pihak-pihak yang terlibat di dalam pengolahan data dan informasi kegiatatn penanaman modal di BKPPMD.

Proses yang masih manual tersebut antara lain: proses perekapan data LKPM, pengklasifikasian LKPM, pembuatan laporan harian dan pembuatan laporan bulanan.

4.2. Usulan Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi sistem yang berjalan, di mana sistem pengolahan data masih dikerjakan secara manual, maka penulis membuat usulan sistem yang dilakukan secara terkomputerisasi.

Dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi diharapkan efektifitas dan efisiensi kerja organisasi.

4.2.1. Tujuan Perancangan Sistem

Tujuan perancangan sistem adalan untuk melengkapi, memperbaiki atau mengembangkan sistem yang sedang berjalan agar menjadi sistem yang lebih berdaya guna dan sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja organisasi.

4.2.2. Perancangan Prosedur yang Diusulkan

Pada prinsipnya prosedur yang diusulkan tidak jauh berbeda dengan prosedur yang sedang berjalan, namun pada teknis operasionalnya penulis mengusulkan ada satu yang dirubah, yaitu : penggunaan sistem aplikasi database.

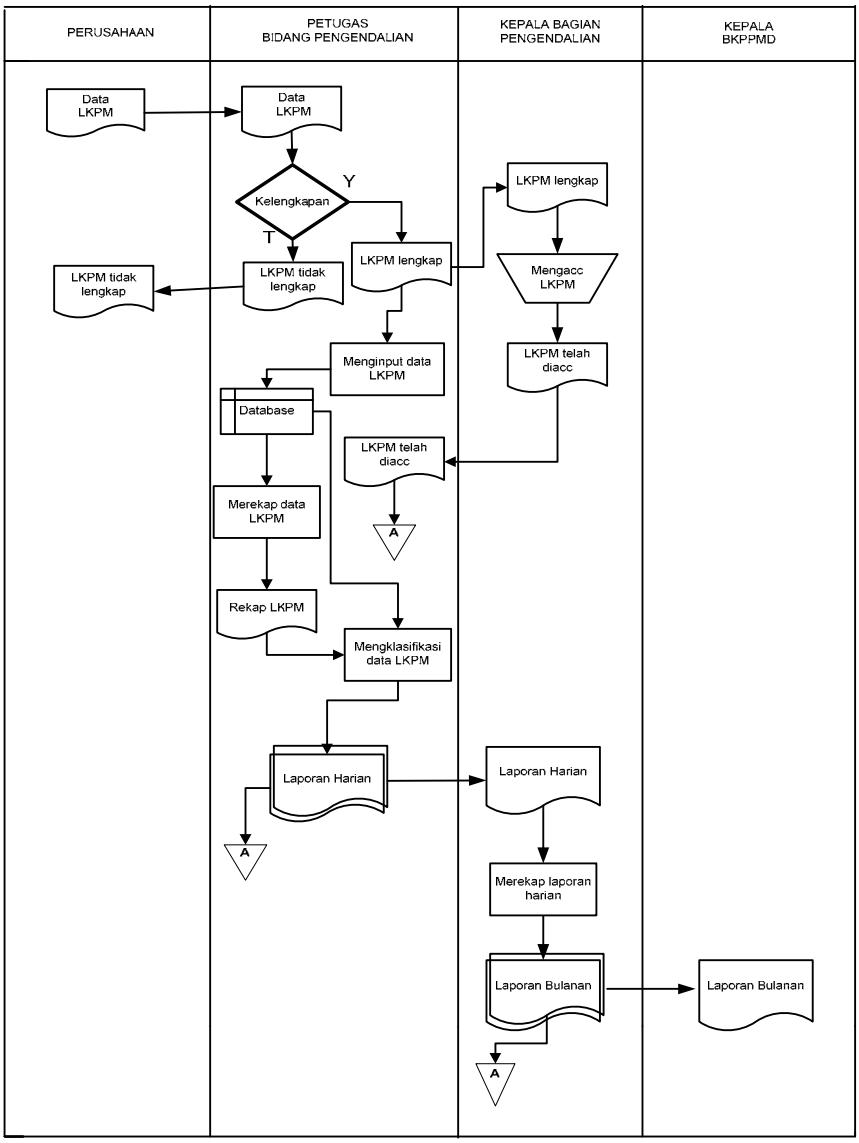
Adapun prosedur pengolahan data pengunjung di Badan Koordinasi Promosi Penanaman Daerah provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Petugas bagian pengendalian akan menerima data LKPM dari perusahaan. LKPM yang diterima akan diseleksi, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi ke perusahaan untuk dilengkapi.
2. Data LKPM yang telah diseleksi akan diinput oleh petugas dan dimasukkan ke dalam database.
3. Setelah diinput, LKPM lengkap tersebut akan diberikan ke Kepala Bagian Pengendalian untuk di acc dan dikembalikan lagi ke petugas bidang pengendalian untuk arsipkan.
4. Berdasarkan LKPM yang masuk, petugas akan merekapitulasi jumlah LKMP tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan kepemilikannya untuk dijadikan laporan harian.

5. Petugas bidang pengendalian akan menyerahkan laporan harian tersebut kepada Kepala Bidang Pengendalian untuk selanjutnya direkap menjadi laporan bulanan.
6. Lapoaran bulanan yang telah dibuat kemudian akan diserahkan kepada Kepala BKPPMD.

4.2.2.1. *Flow Map*

Dari prosedur di atas dapat digambarkan *Flow map* sebagai berikut :



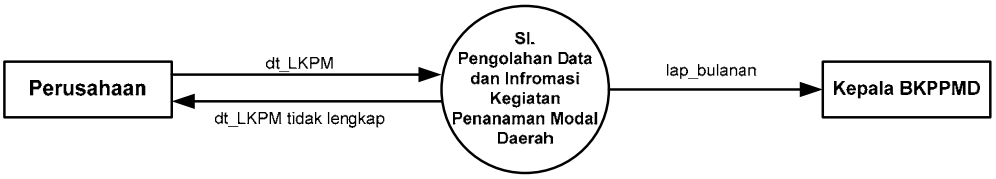
Keterangan :

A : Arsip

Gambar 4.5
Flow Map Sistem yang Diusulkan

4.2.2.2. Diagram Konteks

Diagram konteks berfungsi untuk menggambarkan suatu sistem secara keseluruhan, termasuk menggambarkan aliran-aliran data yang masuk dan keluar pada sistem tersebut.

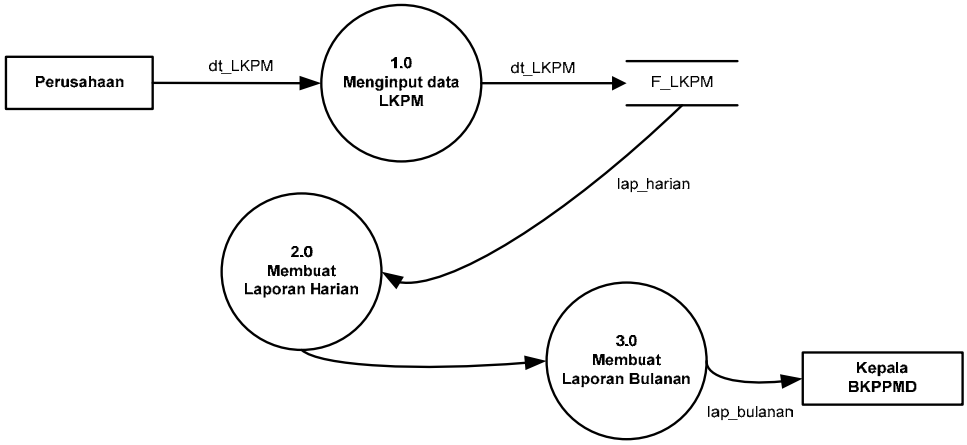


Gambar 4.6
Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan

4.2.2.3. *Data Flow Diagram* (DFD)

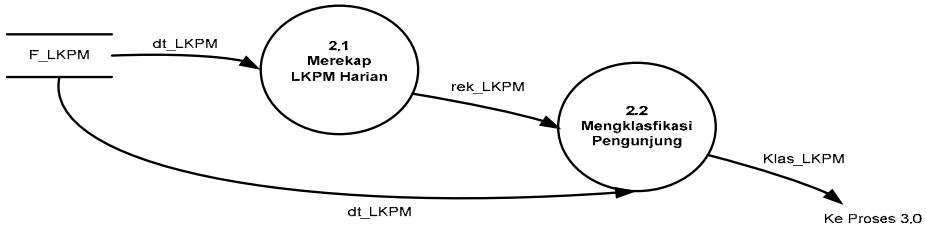
Data flow diagram (DFD) menggambarkan hubungan antar proses yang terjadi di dalam suatu sistem. Adapun *data flow diagram* yang diusulkan adalah :

- ***Data Flow Diagram* (DFD) Level 0 :**



Gambar 4.7
Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem yang Diusulkan

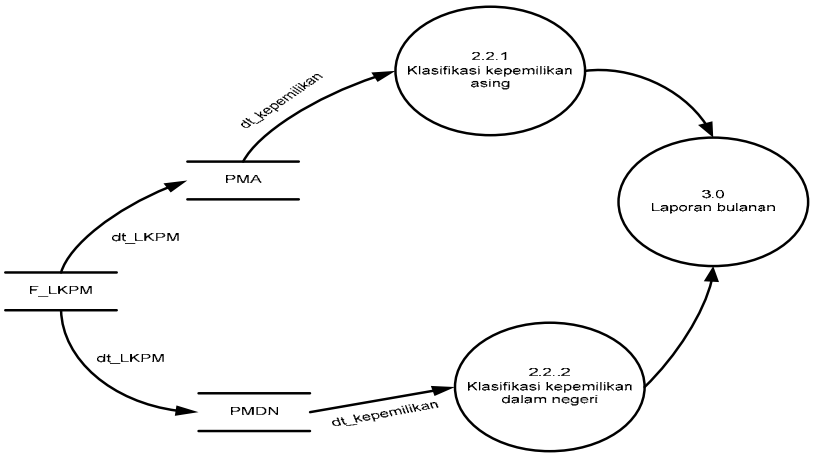
- ***Data Flow Diagram*** **(DFD) Level 1 untuk Proses 2.0 (Laporan Harian):**



Gambar 4.8

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 untuk Proses 2.0 (Laporan Harian)

- ***Data Flow Diagram*** **(DFD) Level 2 untuk proses 2.2 (Klasifikasi Perusahaan) :**



Gambar 4.9
Data Flow Diagram (DFD) Level 2 untuk proses 2.2 (Klasifikasi Perusahan)

4.2.2.4. Kamus Data

1. Nama Arus Data : dt_LKPM

   Alias : -

   Aliran : perusahaan – proses 1 – F_LKPM

   Atribut : nama_perusahaan, alamat, no_telp, bidang_pekerjaan

2. Nama Arus Data : lap_harian

   Alias : -

   Aliran : F_LKPM – proses 2

   Atribut : nama_perusahaan, alamat, no_telp, bidang_pekerjaan, jumlah_LKPM

3. Nama Arus Data : rek_LKPM

   Alias : -

   Aliran : proses 2.1 – proses 2.2

   Atribut :kd_rek, nama_perusahaan, bidang_pekerjaani, jumlah_LKPM,

4. Nama Arus Data : klas_LKPM

   Alias : -

   Aliran : proses 2.2 – proses 3

   Atribut : kd_LKPM, nama_perusahaan, nama_pemilik, modal, jumlah_LKPM

5. Nama Arus Data : dt_kepemilikan

   Alias : -

   Aliran : f_PMA - proses 2.2.1, f_PMDN – proses 2.2.2

   Atribut : nama_perusahaan, nama_pemilik, modal, alamat, no_telp

6. Nama Arus Data : lap_bulanan

   Alias : -

   Aliran : proses 3 – Kepala BKPPMD

   Atribut : kd_lap_bulanan, nama_perusahaan, jumlah_LKPM, Jumlah_pemilik_asing, jumlah_pemilik_dalam_negeri.

4.2.3. Evaluasi Terhadap Sistem yang Diusulkan / dirancang

Dari sistem yang diusulkan di atas dapat terlihat bahwa seluruh proses pengolahan data dilakukan terkomputerisasi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di BKPPMD khususnya bidang Pengendalian, subbidang data dan pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1) Sistem informasi yang sedang berjalan masih bersifat manual, sehingga sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kerja pihak-pihak yang terlibat di dalam pengolahan data kegiatan penanaman modal daerah di BKPPMD provinsi Jawa Barat.
2) Sistem informasi yang diusulkan telah bersifat terkomputerisasi, sehinggga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan data. Dan dengan penggunaan internal storage sehingga mempercepat proses pengolah data dan tidak memakan waktu dalam proses rekapitulasi data.

5.2 Saran

Agar pengolahan data dan informasi kegiatan penanaman modal di BKPPMD Jawa Barat lebih efektif dan efisien, maka alangkah lebih baiknya jika diterapkan sistem informasi yang terkomputerisasi.

Karena dengan menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi diharapkan bisa meningkatkan kinerja para karyawan yang terlibat, sehingga pada akhirnya berimbas pada kualitas pelayanan terhadap perusahaan yang akan melakukan penanaman modal jauh lebih baik.